

**UPAYA BALAI REHABILITASI TERPADU
PENYANDANG DISABILITAS (BRTPD) YOGYAKARTA
DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN TUNA DAKSA
(STUDI DI KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DIY)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Yohanes Alomang
NIM: 12510016

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI /PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
Y O G Y A K A R T A
2018**

**. UPAYA BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG
DISABILITAS(BRTPD) DALAM MENIGKATKAN KEMANDIRIAN
TUNA DAKSA
(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Bantul)**

SKRIPSI



Di susun Oleh :

**Yohanes Alomang
No. Mhs. 12510016**

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

Hari,tanggal : Rabu, 28 Maret 2018

Pukul : 12:00 wib s/d selesai

**Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD”
Yogyakarta**

APMD

TIM PENGUJI

1. Drs.AY.Oelin Marliyantoro,M.Si
Ketua Pengunji/Pembimbing

2. Dra.mC Candra Rusmala Dibyorini,M.Si
Penguji Samping I

3. Dra. Oktarina Albizzia,M.Si
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Sosiatri / Pembangunan Sosial

Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si

NIY : 170230162

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI / PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA”APMD”
YOGYAKARTA**

2018

MOTTO

Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri.

(Aristoteles)

Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu dalam melayani orang lain.

(Mahatma Gandhi)

Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya.

(Magdalena Neuner)

“Saya tidak terlalu memikirkan masa depan yang mata saya tidak sampai melihatnya, tetapi apa yang saya kerjakan hari ini melampaui masa depan”

(Wid. Mahardika)

“Sebuah perahu yang disusun rapi dan kuat tidak akan pernah dapat tenggelam. Begitu juga dengan hati dan jiwa yang kuat tidak akan tergoyahkan dalam taufan hidup dunia yang penuh dengan rintangan dan cobaan.

Sapa menyapa adalah modal dalam meraih kesuksesan. Semangat jangan pernah biarkan pudar agar cahayamu tetap menyala bagi semua orang.

“Doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus”

(Filipi 1 : 9 - 10)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segala nikmat hidup dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas(BRTPD) Dalam Meningkatkan Kemandirian Tuna daksa” . Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Sosial/Pembangunan Sosial. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Drs.AY Oelin Marliyantoro,M.S.i yang selalu sabar melihat wajah saya setiap hari membimbing dalam penulisan skripsi .Terima kasih sudah banyak membantu saya tanpa bosan-bosan hingga skripsi saya selesai. Semoga Tuhan membalas kebaikan bapak
2. Dosen Penguji I & II, Terima kasih telah sudah menguji saya dan koreksi perbab dan perhalaman dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan.Tuhan memberkati
3. Ibu Pudjningsih, SH. Dan ibu Ekoyuningsih, S.I.Kom. Terima kasih telah sabar melihat wajah saya setiap hari dan tak kenal lelah mendidik dan memotivasi. Akhirnya saya Bisa lulus Ibu ! Terima kasih atas dukungan moril dan materil. Tuhan Yesus memberkati ibu selalu.
4. Orang Tua yang tidak kenal lelah Mendoakan saya. Akhirnya saya lulus. Terima kasih yang sangat mendalam atas dukungan moril dan materil
5. Buat Kakak, Str. Eka Apiem, AMd.keb, yang selalu memotivasi dan memberi dukungan moril dan materil sehingga saya bisa dapat menyelesaikan Skripsi dengan cepat.Tuhan memberkati kakak dan keluarganya.
6. Buat Teman-teman Papua di STPMD”APMD, kesetiakawanan kalian semua termotivasi saya dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi sehingga saya menyelesaikan secepat waktu.Saya ucapkan banyak Terima kasih kawan – kawan Mahasiswa Papua.
7. Buat adik-adik tingkat, Terima kasih ,kalianlah penyemangat saya dalam suka maupun duka.
8. Tak Lupah saya ucapkan Banyak Terima kasih Buat teman-teman kos yang sering membantu saya dalam kesusahan sehingga apapun kesusahan saya adalah bagian dari kalian dan penyemangat.Kiranya Tuhan memberkati
9. Terakhir buat seluruh Masyarakat Kecamatan Agimuga yang luangkan waktu memberi dorongan dan motivasi hanya lewat telpon selures.Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Karena sempurna cuma Milik Tuhan. Harapan penulis, informasi dari skripsi ini mampu memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca yang masih berjuang dalam perjuangannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh kasih dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial dalam Program Studi Sosiatri/Pembangunan Sosial di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah mendapat bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga dapat diselesaikan oleh penyusun. Maka pada kesempatan ini penyusun hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Si., M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dra. Oelin Marliyantoro., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial dan seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf karyawan yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu dan dorongan pengetahuan dalam proses pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dra. Oelin Marliyantoro., M.Si selaku ketua pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta kesabaran dan perhatian dalam membimbing/mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Puji Ningsih..... dan ibu naning...yang sebagaimana mendidik dan membantu saya selama menempuh Perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro administrasi pembangunan Setda D.I.Y dan Bantul yang telah memberi izin penelitian kepada penyusun dalam melakukan penelitian. Dan Pihak Pekerja Sosial Balai RTPD Bantul
6. Lurah desa Sri Hardono serta perangkat desa secara khusus Kepada Pak Suprih Selaku Pekerja Sosial .juga kepada para karyawan/I, yang telah memberi izin dan menerima penyusun juga memberi informasi kepada penyusun selama dalam melakukan penelitian.
7. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai tanda terima kasih, penyusun tidak mempunyai sesuatu yang berharga yang dapat diberikan sebagai ucapan rasa syukur atas semua budi baiknya. Namun doa dan harapan penyusun, semoga kebaikan bapak/ibu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa memberikan anugrah yang melimpah di dalam kehidupan bapak/ibu/anak saudara dan saudari sekalian.

Yogyakarta, 10 April 2018

Penyusun

Yohanes Alomang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
SINOPSIS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	12
1. Pembangunan dan kualitas SDM.....	12
2. Karakteristik SDM yang berkualitas.....	13
3. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	20
4. Rehabilitasi anak tunadaksa	21
5. Gerak terbatas (Tuna daksa).....	21
6. Anak dengan kurang fisik atau tuna daksa	22
7. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	23
8. Ada beberapa aspek yang dilakukan Oleh BRTPD	24
E. Metode Penelitian	24

F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data	28
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	29
A. Deskripsi Desa Srihardono.....	29
B. Patologi Desa.....	31
D. Data Keuangan Desa.....	40
E. Trantib dan Bencana	43
F. Riwayat Singkat Berdirinya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyanggah Disabilitas (BRTPD).....	43
G. Dasar Pelaksanaan	44
H. Tujuan	45
I. Tugas dan Fungsi.....	45
J. Visi dan Misi	46
K. Struktur Organisasi BRTPD Yogyakarta.....	47
L. Sarana dan Prasarana	47
BAB III ANALISIS DATA.....	54
A. Identitas Responden.....	54
B. Upaya BRTPD Dalam Meningkatkan Kemandirian Tuna Daksa	57
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakatnya. Faktor terbesarnya adalah padatnya penduduk di negara-negara berkembang atau dalam kata lain jumlah penduduk negara tersebut meningkat tajam atau terus bertambah tetapi sumber daya manusianya tidak cukup berkembang atau maju. Masalah sosial umumnya terjadi didaerah perkotaan. Terutama di daerah perkotaan yang besar, tentunya masalah sosialnya cukup banyak, dan beragam. Salah satu yang dihadapi oleh negara Indonesia tersebut, pembangunan sosial yaitu menyejahterakan masyarakat melalui bantuan sosial dan memperdayakan manusia yang adil dan makmur.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, <http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>.

Seperti Bantuan sosial bagi para tuna daksa. Maka merekapun berhak mendapatkan kesejahteraan serta mendapat lindungan dari negara. Dengan hal ini bantuan sosial bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dalam bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan atas tujuan membangun negara Indonesia, sebagaimana tercantum didalam pembukaan Undang-Undang- Dasar 1945 alinea yang keempat, berbunyi Kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang meliindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan pada umumnya memajukan pembangunan sosial meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Maka oleh karena itu terbentuk kemerdekaan Negara Indonseia yang adil dalam membangun memperdayakan masyarakatnya. Kemudian disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun,

prioritas utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasarannya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemsngunsn Kesejahteraan Sosial (PKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*) pasangan yang mengalami perlakuan salah (*apouse abuse*), anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, dan serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

Dengan demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "Disabilitas dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual (*Anonim, 2016*) Penyandang Disabilitas terdiri dari tuna netra (buta), Tun rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tunagrahita (cacat mental), tuna ganda (komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan). Yang dapat diketahui selama ini penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai masalah sosial yang menjadi beban negara dan pemerintah, dalam hal ini kelompok masyarakat yang kurang mampu atau kondisi kurang sehat penyebab sakit atau penyakit keturunan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dan lembaga- lembaga sosial. Namun, kenyataannya hanya para insan disabilitas menjadi obyek pembangunan. Pandangan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan karena insan disabilitas memiliki kemampuan yang bisa dapat diberdayakan dan meningkatkan potensinya.

Hal ini disebabkan dengan memanfaatkan organ kaki dan tubuh tersebut, manusia dapat melengkapi dan merehalisasikan segala keinginan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik yang dilakukan secara parsial maupun integral bersama organ sensoris pendukung lainnya. Atas dasar itulah, apabila fungsi kedua anggota tubuh tersebut mengalami gangguan, baik sebagian atau keseluruhan, yang disebabkan oleh luka pada bagian saraf otak, kelainan pertumbuhan akan mempengaruhi mobilitas hidup yang bersangkutan. Berat dan ringannya dampak pengiring yang menyertai kondisi Ketunadaksaan tergantung pada gradasi kelainan yang dialami. Dengan kata lain, semakin berat kelainan yang diderita maka makin kompleks dampak yang akurat pada penderita kelainan anggota tubuh (tuna daksa), secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam rangka memperdayakan kemampuannya secara optimal.

Permasalahan sosial yang perlu diperhatikan dari negara adalah masalah penyandang disabilitas pada khususnya dan umumnya permasalahan kesejahteraan sosial, sebab mereka yang kurang mampu atau tuna daksa sangat memerlukan saluran bantuan kemanusiaan dari negara, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial, ini tanggungjawab bagi negara Indonesia yang bertujuan mensejahterakan hal ini warga negara menjadi menderita, miskin dan penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama, perlindungan yang baik, kesejahteraan utuh.

Permasalahan penyandang disabilitas khususnya kalangan masyarakat kelas menengah bawah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dan mereka juga memiliki hak untuk merasakan kesejahteraan dan keadilan

sebagaimana masyarakat yang lain. Insan disabilitas yang kurang anggota tubuhnya mengakibatkan banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam kehidupannya. Apabila negara atau pemerintah tidak serius menanganinya, hal ini dapat menjadi suatu masalah sosial yang menghambat pembangunan sumberdaya manusia. Demikian akan menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial, sedangkan perspektif dari negara-negara luar menjadi minus bagi negara Indonesia, padahal para insan disabilitas tubuh tersebut dapat menjadi sangat berguna ketika negara dan pemerintah mengangani dengan serius dan bijak.

Penyandang tuna daksa merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan pemberdayaan manusia melalui upaya kesejahteraan sosial secara baik bagi masyarakat umum dan bagian dari komponen masyarakat yang masih mempunyai potensi, oleh karena itu pemerintah atau lembaga-lembaga berusaha mencari solusi atau upaya-upaya merehabilitasikan bagi penyandang disabilitas atau prinsip belas kasihan harus di upayakan menyangkut derajat penyandang tuna daksa yang layak sebagai individu/manusia dengan berbagai jenis upaya dalam pontensi kemampuannya yang dimilikinya.

Sejauh ini Yayasan Kick Andy berusaha mencari terobosan untuk membantu penyandang disabilitas kaki. Di antara terobosan tersebut adalah melalui Dana Bina Lingkungan sebesar Rp 2 milyar dari Bank Mandiri untuk menyediakan kaki palsu dalam gerakan bertajuk "Gerakan 1000 Kaki Palsu untuk Hidup Mandiri". Kulonprogo melalui Dinsosnakertrans sudah lama mengusulkan ke Yayasan Kick Andy untuk menyediakan kaki palsu, namun

baru saat ini bisa terlaksana. Penyerahan bantuan kaki palsu tersebut dilaksanakan di Aula Dinsosnakertrans, Jum'at (27/07) disaksikan Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K), Area Manager PT Bank Mandiri Yogyakarta, B. Wisnu Handjali, Ali Sadikin dari Kick Andy Foundation, dan Sugeng Siswoyudono, produsen kaki palsu asal Mojosari, Jatim.

Menurut Ali Sadikin kaki palsu buatan Sugeng ini bisa *di-customize* sesuai kebutuhan pemakai. Pembuatannya pun melalui riset dan pengujian yang melibatkan deputi Kemenristek, bahkan saat diuji kaki palsu tersebut mampu menahan beban hampir satu ton. Ali Sadikin menambahi program ini bukanlah bagi-bagi kaki palsu seperti pembagian sembako, tetapi program ini adalah bagi-bagi semangat kemandirian supaya masyarakat yang dibantu bisa lebih mandiri dan berdaya sehingga tidak tergantung pada orang lain. "Dengan keberdayaan tersebut, diharapkan mereka juga dapat lebih produktif, seperti Sugeng. Mohon kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, dan mau mensyukurinya dengan berusaha untuk mandiri", lanjut Sugeng.

Sedangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai obyek hukum. Yang dimaksud obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihak-i oleh subjek hukum.

Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Disimpan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan dan pengakuan hukum penyandang disabilitas, alangkah baiknya kita terlebih dulu mengetahui apa itu penyandang disabilitas. Bila melirik dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwa "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental. "

Adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan hak asasi manusia pada umumnya,

tanpa memandang sebelah mata mengenai ada atau tidaknya kecacatan secara fisik atau kecacatan mental.

Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Sebelum pengesahan UU Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauh-jauh waktu sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. diantaranya: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana Konvensi Internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York..

Selain undang-undang, terdapat juga dalam peraturan daerah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkah dikenal dengan istilah "difable" (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*", Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015]

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut: (a), hidup; (b), bebas dari stigma; (c), privasi; (d), keadilan dan perlindungan hukum; (e), pendidikan; (f), pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (g), kesehatan; (h), politik; (i), keagamaan; (j), keolahragaan; (k), kebudayaan dan pariwisata; (l), kesejahteraan sosial; (m), Aksesibilitas; (n). Pelayanan Publik; (o). Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; (q). Konsesi; (r), pendataan; (s), hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan (t) berekspresi. (Anonim, 2017)

Data Dinas Sosial, DIY hingga Maret 2016 ada 25.050 penyandang disabilitas. Jumlah tersebut dengan rincian laki laki 13.589 orang, dan perempuan 11.461 orang. Dari lima daerah kabupaten/kota, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota

Yogyakarta 1. 819. Data tersebut adalah data penyandang disabilitas yang masuk kategori miskin dan membutuhkan bantuan. Sementara tidak ada data yang menyebutkan secara pasti jumlah penyandang disabilitas yang bekerja.

Jumlah penyandang tunadaksa akan terus bertambah. Hal ini harus disikapi oleh pemerintah, yang mana dibutuhkan pemberian pendidikan maupun penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang dapat membantu memperluas ruang gerak para penyandang tunadaksa. Masalah utama yang sering dihadapi para penyandang tuna daksa adalah aktualisasi diri dimasyarakat. Banyak penyandang tuna daksa meskipun mempunyai fisik cacat, secara kognitif sepadan dengan dengan orang normal lainnya. Namun, sering kali mereka mereka tidak memiliki ruang untuk menuangkan pemikiran dan pendapatnya sehingga sangat jarang terlibat dihidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam permasalahan ini yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti, karena dalam hal ini setiap warga negara termasuk insan disabilitas cacat tubuh mempunyai hak yang sama untuk hidup hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Oleh karenanya salah satu Usaha untuk mewujudkan kemandirian Insan Rehabilitasi tubuh tersebut adalah melalui program pembimbingan, ketrampilan supaya meningkatkan kemandirian melalui program-program tersebut. Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang mendampingi para penyandang disabilitas tubuh tersebut. Kemudian Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Di Balai Rehabilitasi Terpadu Insan Disabilitas Yogyakarta, karena Balai ini merupakan salah satu UPT dibawah

naungan Dinas sosial DIY, bertujuan untuk melayani penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik lebih jauh memahami dan meneliti atau melihat bagaimana upaya peningkatan kemandirian bagi insan disabilitas tubuh dapat merehabilitasi secara efektif dan efisien sehingga disini dapat perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas tubuh. Sasarannya merupakan suatu tindak atau langkah mengetahui dan mewujudkan partisipasi secara penuh bagi para insan disabilitas tubuh dalam pembangunan sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas, maka peneliti berfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana Upaya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Kemandirian Tunadaksa"?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Upaya Balai Rehabilitasi Terpadu Insan Disabilitas dalam meningkatkan kemandirian tunadaksa

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya Upaya Balai Rehabilitasi Terpadu Insan Disabilitas dalam meningkatkan kemandirian tunadaksa, khususnya bagi Program Studi Ilmu Sosiatri dan pada umumnya ilmu sosial.

b. Manfaat Akademik

Memberikan kejelasan akademik bagi prodi ilmu sosiatri atau pembangunan sosial khususnya minat studi kegiatan sosial dalam menjalankan kemandirian tunadaksa.

D. Kerangka Teori

1. Pembangunan dan kualitas SDM

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional, (<http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>).

Seperti yang telah di kemukan diatas, yang dimaksud dengan pembangunan adalah perubahan sosial yang dikendalikan itu. Pembangunan sebagai perubahan sosial tidak hanyamenyangkut

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, Ivancevich, & Donnely, (1987) *Keinginan untuk Bergerak dan Berkuasa*
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81/KEP/2009 Tentang keputusan suatu tugas rehabilitasi terpadu Penyandang disabilitas
- Meimulyani dkk. 1013: *Anak yang memiliki kekurangan fisik termasuk dalam Kategori Anak Berkebutuhan Khusus, Angunan Sosial*
- Meimulyani, dkk. 1013: *Anak yang memiliki kekurangan fisik termasuk dalam kategori anak berkebutuhan*
- Riandi, dkk. (2006). *Ada Tiga Faktor. Yaitu Faktor Kelahiran, Kecelakaan, dan Virus*. Yayasan Cinta Anak Indonesia Tasikmalaya (2010) *menuliskan dalam website-nya*
- Riandi, dkk. (2006). *Faktor- Faktor Yang Mempengarui Kelainan/Cacat Tubuh*
- Soekidjo Notoatmodjo,. *Pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia*, Jakarta: 2015
- Tim Penyusun Pembaharuan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang disabilitas Maleong*, 2005,

Sumber Lain

- Anonim. (2017). [www.kulonprogokab.go.id/v21 /Kick-Andy-Foundation-Bantu-kaki-Palsu-di-Kulon-Progo_2287](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kick-Andy-Foundation-Bantu-kaki-Palsu-di-Kulon-Progo_2287).
- Anonim. (2017). [http://www. Bantuan hukum. or. id/web/wpcontent/uploads/2014/03 /iabilitas](http://www.Bantuan.hukum.or.id/web/wpcontent/uploads/2014/03/iabilitas)
- Anonim. (2017) [http://www. hukumpedia. com/jamilncera/pendidikan-dan-pengakuan-hukum-penvandang-disabilitas-di-indonesia](http://www.hukumpedia.com/jamilncera/pendidikan-dan-pengakuan-hukum-penvandang-disabilitas-di-indonesia)Anomi. (2003)://
- [www. academia. edu/16629733/Karakteristik Ideal Sumber Daya Manusia Berkualitas](http://www.academia.edu/16629733/Karakteristik_Ideal_Sumber_Daya_Manusia_Berkualitas) Anomi. (201 7) [http://stiebanten. blogspot. co. id/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan. html](http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html).